



ANALISIS YURIDIS MULTIPLE ACCOUNTABILITY FORUMS DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Studi Kasus Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala

Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan 2017)

ANALISIS YURIDIS MULTIPLE ACCOUNTABILITY FORUMS DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

(Studi Kasus Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan 2017)

INTISARI

Laurensia Frida Alfiani¹ dan Richo Andi Wibowo²

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis konsep hukum *multiple accountability forums* yang menjalankan fungsi pengawasan pada penyelesaian pelanggaran hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, serta proporsionalitas sanksi berlapis yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian terhadap asas hukum serta perbandingan hukum. Dalam penelitian ini penulis melihat konsep hukum *multiple accountability forums* dalam fungsi pengawasan, serta penerapan hukum administrasi dan hukum pidana yang diterapkan secara berkesinambungan, yang berakibat pada penjatuhan sanksi berlapis. Apakah sanksi-sanksi yang dijatuhkan sudah proporsional menurut hukum atau belum. Apakah terdapat peluang menerapkan pilihan sanksi berdasarkan asas *una via* atau tidak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum *multiple accountability forums* dalam fungsi pengawasan bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan sektoral. Semua lembaga berwenang untuk ikut mengawasi, memeriksa, serta memberikan sanksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dalam kasus Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Sehingga paksaan administrasi (*administrative coercion*), sanksi administrasi, dan sanksi pidana dilaksanakan secara berkesinambungan. Sanksi berlapis khususnya sanksi yang bersifat finansial ternyata belum mencerminkan proporsionalitas bagi pemulihan kerugian negara dan akibat pelanggaran hukum yang ditimbulkan, bahkan cenderung berlebihan. Lebih lanjut, asas *una via* sebetulnya dapat menjadi solusi penyelesaian jika terjadi pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif secara berkesinambungan, jika lembaga penilai akuntabilitas mempertimbangkan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi.

Kata kunci: *multiple accountability forums*, pengadaan barang/jasa, pengawasan, sanksi berlapis.

JURIDICAL ANALYSIS OF MULTIPLE ACCOUNTABILITY FORUMS FOR THE DISPUTE RESOLUTION OF PUBLIC PROCUREMENT

(Case Study on Procurement of Mandala Krida Stadium Construction Works in the 2016 and 2017 Fiscal Year)

ABSTRACT

¹Advokat yang menempuh studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Dosen dengan minat riset Kontrak Pemerintah, Patologi Birokrasi, dan Perbandingan Hukum Publik pada Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

This research aims to explain and analyze the legal concept of multiple accountability forums which have supervision authority of public procurement, as well as the proportionality of the layered sanctions given to Commitment-Making Officer and Contractor. The case study in this research is the Procurement of Mandala Krida Stadium Construction Works in the 2016 and 2017 Fiscal Years.

*This study uses normative legal research methods. This research includes research on principles of law and comparative law. In this research, the authors observed the legal concept of multiple accountability forums which have supervision authority, as well as the application of administrative law and criminal law which were applied simultaneously, which resulted in the imposition of multiple sanctions. Whether the sanctions imposed are proportional according to law or not. Is there an opportunity to apply the sanction option based on *una via* principle or not.*

The results of this study indicate that the law of multiple accountability forums which have supervision authority works based on sectoral regulations. All institutions have the authority to participate in supervising, inspecting, and imposing sanctions on Procurement of Mandala Krida Stadium Construction Works in the 2016 and 2017 Fiscal Years. Thus, administrative coercion, administrative sanctions, and criminal sanctions are carried out continuously.

*. Layered sanctions, especially those of a financial nature, apparently do not yet reflect proportionality for the recovery of state losses and the resulting legal violations, and even tend to be excessive. Furthermore, the principle of *una via* can actually be a settlement solution in the event of a violation of the law which can be subject to criminal sanctions and administrative sanctions simultaneously, if the accountability assessment agency considers the principle of proportionality in imposing sanctions.*

Keywords: multiple accountability forums, procurement, supervision, multiple sanctions

³ Advocate studying at Master of Business and Constitutional Law Student, Postgraduate Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

⁴ Lecturer with research interest in Government Contracts, Bureaupathology, and Comparative Public Law at the Department of Administrative Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta